

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMILIK MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA
(TINJAUAN YURIDIS UU NO. 15 TH. 2001)**

Oleh

Sutrisno dan Fauzul Ali W.
Ilmu Hukum FH-UPNV Jawa Timur

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan adanya pendaftaran merek. Dan untuk mengetahui usaha-usaha yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa-sengketa merek.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, bahwa pemecahan masalah ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tetap dengan melihat nilai serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder melalui literatur, peraturan perundang-undangan majalah, dan media cetak lainnya dan data-data kasus di Pengadilan Negeri Surabaya.

Analisa data menggunakan deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai perlindungan kepada pemilik merek terdaftar hak atas merek dan berkaitan dengan upaya hukum yang ditempuh oleh pemilik hak atas merek.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa UU- Merek 2001 menganut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila merek tersebut dimintakan pendaftaran. Keuntungan dari sistem konstitutif ini adalah orang yang mereknya sudah terdaftar tidak dapat diganggu oleh pemakai merek yang tidak diketahui ketika ia mendaftarkan mereknya. Sedangkan kerugiannya adalah bahwa Daftar Umum Merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formil terdaftar, akan tetapi sepenuhnya tidak dipakai.

Kata kunci : UU.Merek tahun 2001, pendaftaran merek, sengketa merek.

PENDAHULUAN

Telah ditegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa.

Apalagi dunia perdagangan dan industri dewasa ini semakin berkembang dengan pesat. Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di negara kita cukup tinggi. Banyak sekali pengusaha yang melakukan ekspansi atau perluasan perusahaan dan industrinya secara besar-

besaran. Tiap-tiap pengusaha berlomba-lomba mencari dan menggarap lahan-lahan bisnis baru guna memenuhi tuntutan pasar yang kian meningkat.

Keadaan yang demikian memang selalu menimbulkan persaingan yang keras diantara para pengusaha. Mereka saling berlomba untuk membuat agar barang produksinya menjadi yang paling laku dipasaran. Persaingan tersebut demikian kerasnya sehingga tidak saja dilakukan dengan cara-cara yang sehat dan benar, tetapi banyak juga yang ditempuh dengan cara tidak sehat dan merugikan orang lain atau perusahaan lain, yakni dengan cara curang dan ilegal. Dalam dunia perdagangan banyak sekali persaingan curang yang biasa dilakukan para pengusaha yang ingin sukses dengan lewat jalan pintas.

Aparat pemerintah kita sebenarnya telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Hal ini antara lain telah dibuktikan dengan diundangkannya undang-undang Nomer 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang merek (yang merupakan penyempurna pengaturan dan perlindungan hak atas merek yang selama ini diatur dalam undang-undang nomer 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Merek Nomer 15 Tahun 2001 tersebut diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya kasus-kasus persaingan curang dalam dunia perdagangan khususnya yang menyangkut masalah merek. Undang-Undang yang diundangkan pada tanggal 1 agustus 2001 tersebut diharapkan cukup memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar yang beritikad baik.

Bentuk-bentuk sengketa merek yang muncul saat ini dalam dunia perdagangan misalnya peniruan atau penjiplakan yang dilakukan para pengusaha atas merek-merek yang terkenal dari perusahaan lain untuk digunakan pada barang-barang sejenis hasil produksi perusahaannya. Juga dapat terjadi seorang pengusaha membubuhi merek pada barang-barang hasil produksinya menyerupai atau mirip sekali dengan merek barang yang sejenis hasil produksi perusahaan lain. Namun disini yang sering terjadi adalah peniruan atau penjiplakan barang atas merek-merek yang sudah terkenal. Misalnya pemalsuan merek gergaji Swedia. Hal ini sering kali terjadi bahan perdebatan dalam praktek. Karena apabila dibiarkan kasus ini akan dapat mengakibatkan kekeliruan atau salah tafsir dari khalayak ramai atas barang-barang yang telah lebih dahulu dengan mutu yang baik.

Karena bagaimanapun khalayak ramai harus diberi perlindungan dari kemungkinan ulah para pengusaha yang dengan "itikad buruk" mencoba memanfaatkan celah-celah kosong dari undang-undang merek 1961. Kiranya tepat sekali dengan adanya penyempurnaan atas perlindungan hukum dalam Undang-Undang merek 2001,

demikian juga pendapat Sudargo Gautama (1997) yang menyatakan bahwa Siapa yang berhak atas suatu merek, yaitu seseorang yang telah mendaftarkannya di Indonesia. Tetapi dengan itikad baik! Jika pendaftaran ini telah dilakukan dengan itikad buruk, maka tidak akan dapat diberikan perlindungan.

Hal ini tentunya dilakukan agar para pengusaha dapat lebih mengembangkan sendiri kreatifitasnya dalam mencipta suatu merek untuk digunakan pada barang hasil produksinya sendiri. Juga untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atas merek-merek yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas.

Selanjutnya bila kita simak sebagian bunyi pasal 3 bagian pertama Undang-Undang Merek 2001 yang menyebutkan bahwa perlindungan hanya diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek.

Di dalam praktek memang sering terjadi kasus gugatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan asing atas mereknya yang belum beredar di Indonesia, tetapi telah ditiru oleh pengusaha Indonesia. Hal ini bila tetap dibiarkan tentu akan mempunyai akibat kurang baik karena para pengusaha Indonesia bisa jatuh kredibilitasnya di mata para pengusaha asing. Dan ini sedikit banyak juga menghambat usaha pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya mengajak para pengusaha asing untuk melakukan join bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia.

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :Apakah Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 cukup memberikan perlindungan kepada pemilik merek terdaftar hak atas merek ?

Dalam hal terjadi sengketa, upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pemilik hak atas merek untuk mempertahankan haknya ?

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan adanya pendaftaran merek. Dan

untuk mengetahui usaha-usaha yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa-sengketa merek.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, bahwa pemecahan masalah ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tetap dengan melihat nilai serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder melalui literatur, peraturan perundang-undangan majalah, dan media cetak lainnya dan data-data kasus di Pengadilan Negeri Surabaya.

Analisa data menggunakan deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai perlindungan kepada pemilik merek terdaftar hak atas merek dan berkaitan dengan upaya hukum yang ditempuh oleh pemilik hak atas merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan kepada pemilik merek terdaftar

a. Prosedur Pendaftaran Merek

Merek yang dibuat atau diciptakan itu harus didaftarkan di Kantor Merek agar dapat lebih terlindungi dan mempunyai kepastian hukum. Apalagi undang-undang Merek 1992 menganut sistem konstitutif maka hendaknya merek tersebut didaftarkan pada Kantor Ditjen Hak Cipta dan Merek Departemen Kehakiman RI. Bagi orang atau badan hukum yang akan mendaftarkan mereknya maka harus dipenuhinya syarat-syarat pendaftaran merek baik syarat formil maupun syarat materiilnya.

Tata cara pendaftaran merek telah ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang cara permintaan pendaftaran merek. Adapun prosedur pendaftaran merek itu melalui pengumuman dan pengajuan keberatan.

b. Pengumuman Permohonan Pendaftaran

Sebelum dapat dilakukan pendaftaran maka akan dilakukan pengumuman oleh Kantor Merek dalam

waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah permintaan pendaftaran dalam berita resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek (pasal 19 UUM 2001). Pengumuman ini juga dilakukan dengan menempelkan pada Papan Pengumuman yang khusus disediakan di Kantor Merek.

Selama pengumuman dilakukan dapat diajukan keberatan-keberatan oleh pihak ketiga/umum terhadap pencatatan merek ini (pasal 22 Undang-Undang Merek 2001). Dalam pengumuman ini dicantumkan bukan saja nama dan alamat lengkap si pemohon atau kuasanya. Juga kelas dan jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan untuk didaftarkan, tanggal penerimaan permintaan pendaftaran ini dan kalau diminta dengan hak prioritas (berdasarkan konvensi tentang perlindungan hak merek) dicantumkan, berikut tanggal serta nomor dari Kantor Merek negara dimana permintaan pendaftaran merek bersangkutan dilakukan pertama kali. Kemudian juga contoh dari etiket merek diumumkan pula.

Dalam praktiknya Kantor Merek di Tangerang kini tidak melakukan pengumuman di papan pengumuman, melihat demikian banyaknya jumlah permohonan pendaftaran. Tetapi permohonan pendaftaran ini dikumpulkan dalam ruangan untuk dapat dilihat oleh peminat.

c. Keberatan pihak ketiga

Maksud dari pengumuman ini adalah untuk memberi kesempatan pada khalayak ramai untuk mengajukan "pandangan atau keberatan" terhadap permohonan ini. Dalam pasal 22 UUM 2001 dijelaskan bahwa selama jangka waktu pengumuman itu (6 bulan), setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan secara tertulis keberatan atas permintaan pendaftaran bersangkutan. Keberatan dari pihak ketiga ini disertai dengan bukti bahwa merek bersangkutan sesungguhnya tidak dapat didaftarkan atau ditolak.

Kemudian Kantor Merek secepatnya mengirim salinan dari keberatan pihak ketiga ini, kepada sipemohon atau kuasanya.

Kepada pihak pemohon pendaftaran diberi kesempatan untuk membela diri ia dapat mengajukan "sanggahan" terhadap "keberatan" yang diajukan oleh pihak ketiga itu.

Ada jangka waktu untuk sanggahan bersangkutan ini harus diajukan secara tertulis. Yakni dalam dua bulan setelah tanggal surat Kantor Merek yang memberitahukan tentang adanya keberatan dari pihak ketiga terhadap pendaftaran yang bersangkutan itu. Kemudian oleh Kantor merek, baik keberatan dari pihak ketiga maupun sanggahan dari pihak pemohon dipakai sebagai bahan dalam pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran ini (pasal 24 UUM 2001).

d.Pemeriksaan substantif

Setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman yang penting adalah bahwa kemudian Kantor Merek melakukan pemeriksaan secara substantif yang artinya secara materiil (pasal 5 + 6 UUM 2001) diperiksa baik keberatan atau sanggahan. Kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama, hal ini kiranya sesuai dengan asas "audiatur", atau "audi alteram partem" yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata yang baik yaitu bahwa kedua belah pihak harus didengar dengan memberikan kepada masing-masing kesempatan untuk membela diri dan mempertahankan dalil-dalilnya secara sama rata (Sudargo Gautama Dan Rizawanto Winata, 1992)

Harus diperhatikan juga oleh Kantor Merek itu dalam pasal 5 dan 6 yakni mengenai syarat-syarat mengenai apa saja yang tidak boleh didaftarkan sebagai merek dan apakah ada persamaan pokok dari merek bersangkutan dengan merek orang lain (pasal 25 UUM 2001). Pemeriksaan diselesaikan selambat-lambatnya 9 bulan sejak tanggal jangka waktu menyampaikan sanggahan (pasal 26 UUM 2001).

Jadi di sini dilakukan pemeriksaan secara mendalam dan juga didengar pendapat dari pihak umum (khalayak ramai), apakah benar-benar merek itu adalah hak daripada sipemohon pendaftaran.

Adapun syarat-syarat formil dari permintaan pendaftaran merek diatur dalam pasal 7 dan 9 Undang-Undang Merek 2001 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sedang syarat materiil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Merek 2001.

Berdasarkan syarat formil tersebut daitur bahwa permintaan pendaftaran merek harus dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat yang disertai lampiran-lampiran :

- 1). Syarat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya dan tidak meniru orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya.
- 2). Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan, yang mana bila etiket merek itu berwarna harus disertai satu lembar etiket merek yang tidak berwarna (hitam putih), dan etiket itu berukuran :
 - a. Maksimum 9 x 9 cm.
 - b. Minimal 2 x 2 cm.Juga huruf-huruf dan kata-kata asing yang tertera dalam etiket yang tidak dikenal harus diterangkan ke dalam bahasa Indonesia pada surat permohonan atau pada surat keterangan tersendiri.
- 3). Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badang hukum Indonesia.
- 4). Surat kuasa khusus apabila permintaan pendaftaran mereka diajukan melalui kuasa.

Selanjutnya pada waktu mengajukan permohonan permintaan pendaftaran mereka maka harus dipenuhi pula biaya-biaya sebagaimana telah diatur dalam pasal 75 UUM No. 15 Tahun 2001.

Saya kira biaya-biaya permohonan pendaftaran merek tersebut akan terus memerlukan penyesuaian dengan keadaan nilai mata uang pada masa-masa yang akan datang.

Tidak seperti pada waktu Undang-Undang Merek Lama yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 1961 yang dicantumkan biaya-biaya permohonan pendaftaran merek dalam pasal 4 ayat 2 pencantuman ini terasa janggal. Karena kita menyadari bahwa nilai rupiah terus berubah-ubah dari tahun ke tahun. Sebaiknya memang tenatang biaya-biaya ini tidak perlu dicantumkan dalam Undang-Undang, tetapi cukup diserahkan kepada suatu kebijaksanaan atau peraturan yang dibuat oleh menteri. Kiranya tepat sekali bila dalam undang-undang merek baru No. 15 tahun 2001 tidak dicantumkan tentang biaya-biaya itu, tetapi ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Kiranya saya dapat menyetujui pendapat dari Djoko Prakoso yang mengatakan sebagai berikut :

Sehubungan dengan nilai mata uang yang berubah-ubah itu maka sebaiknya di dalam Undang-Undang Merek tidak ditentukan suatu jumlah tertentu, tetapi diserahkan kepada suatu kebijaksanaan menteri yang dituangkan di dalam suatu bentuk peraturan. Dengan menempuh cara demikian maka diharapkan bahwa jumlah uang pendaftaran itu akan selalu dapat ditentukan mengikuti perkembangan nilai uang sehingga dapat dianggap pantas oleh umum (Djoko Prakoso, 1997)

Hal ini memang tepat sekali dan akan tersa lebih luwes karena peraturan Menteri tersebut akan lebih mudah untuk diubah-ubah sesuai dengan perkembangan naik turunnya nilai uang daripada dituangkan dalam Undang-Undang yang lebih sulit untuk diubah.

Di atas telah dijelaskan tentang syarat-syarat formil permintaan pendaftaran merek. Kini perlu diketahui pula syarat-syarat materiilnya. Syarat materiil pendaftaran merek (untuk memenuhi syarat sebagai merek) diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Merek 2001. lebih lanjut disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang merek 2001 bahwa :

Perubahan pendaftaran merek akan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar untuk

barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.

1. Permintaan pendaftaran merek juga akan ditolak oleh Kantor Merek apabila :

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Dalam memori penjelasan dikatakan bahwa penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- b. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem. Dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ; atau
- d. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak Cipta tersebut.

Adapun pengertian dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Merek 2001 yaitu "menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya" ialah memalsu, menjiplak maupun meniru merek milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis secara keseluruhan mulai mekasan hingga isinya, atau mulai logo/nama hingga mekanisme kerjanya. Sedangkan pengertian kata "menggunakan merek yang sama pada pokoknya" ialah memalsu, menjiplak maupun meniru merek orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis hanya pada "mereknya" saja.

Bahkan dalam perkembangannya saat ini Kantor Ditjen Hak Cipta Paten dan Merekpun akan menolak permohonan pendaftaran merek apabila merek yang akan didaftarkan itu mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan

merek terkenal milik orang atau badan hukum lain untuk barang atau jasa tidak sejenis. Misalnya merek Levi's.

Jika hasil pemeriksaan akhirnya positif, maka permintaan pendaftaran dapat disetujui dan dalam hal demikian Kantor Merek mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek. Sedangkan apabila ternyata hasil pemeriksaan adalah negatif, maka Kantor Merek memberitahukan keputusan ditolaknya pendaftaran ini kepada pendaftar dengan menyebutkan alasan-alasannya.

2. Saat Mulai Berlakunya Pendaftaran Merek

Merek yang permintaan pendaftarannya disetujui dan didaftar dalam Daftar Umum Merek. Dan pendaftaran ini diberitahukan kepada orang yang minta pendaftarannya (termasuk badan hukum atau kuasanya) dan juga diberikan kepadanya suatu "sertifikat Merek". Serta diumumkan pendaftaran ini dalam "Berita Resmi Merek". Jadi pengumuman tidak lagi dalam Tambahan Berita Negara (Undang-Undang No. 21 tahun 1961), tetapi dalam Berita Resmi Merek yang nilainya menurut undang-undang No. 15 Tahun 2001 ini disamakan dengan Tambahan Berita Negara.

Menurut Memori penjelasan bahwa Sertifikat Merek ini merupakan "Surat Bukti Pendaftaran Merek" dan penyampaiannya dapat dilakukan bersama dengan surat Pemberitahuan tentang didaftarkannya merek. Jadi disini sertifikat merek ini fungsinya mungkin dapat disamakan dengan "Sertifikat Hak Tanah" atau "Surat BPKB" untuk kendaraan bermotor. Penyampaian sertifikat ini harus dilakukan kepada si pendaftar dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal merek bersangkutan didaftarkan. Jika melalui kuasa maka sertifikat merek ini disampaikan secara tertulis kepada kuasanya dengan "tembusan kepada pemilik merek". Hal ini merupakan "sistem check dan recheck" yang mana pembuat undang-undang khawatir bahwa kuasa bersangkutan tidak langsung memberitahukan kepada sipemilik merek

mengenai pendaftaran ini. Dalam memori penjelasan diberitahukan mengenai hal ini bahwa "penyampaian tembusan surat kepada pemilik merek yang terdaftar, dimaksudkan untuk memberitahukan mengenai pihak yang paling berkepentingan dengan merek tersebut". Jadi bukan karena kurang percaya atau mempercayai orang yang bertindak sebagai kuasa itu.

Dalam sertifikat merek itu dicantumkan nama dan alamat pemilik merek serta kuasanya jika melalui kuasa. Tanggal diajukan dan tanggal penerimaan pendaftaran merek. Kemudian nomor dan tanggal pendaftarannya, kelas dan jenis barang atau jasa bersangkutan serta jangka waktu berlakunya pendaftaran ini, yaitu 10 tahun. Jadi di sini pendaftaran merek mulai berlaku dan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

3. Lenyapnya Hak Atas Merek dan Hapusnya Kekuatan Hukum Suatu Pendaftaran Merek

Hak atas sebuah merek lenyap, artinya anggapan yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang sebagai pemilik merek terdaftar menjadi lenyap. Hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain, karena orang atau badan hukum yang berhak atas merek itu dengan sukarela melepaskan haknya. Hal ini misalnya sana terjadi karena seseorang yang telah mendaftarkan sebuah merek atas namanya kepada Kantor Merek, mendapat bantahan dari orang lain yang juga mempunyai hak atas merek tersebut. Di dalam praktek yang sering terjadi adalah kasus-kasus peniruan atau penjiplakan merek-merek terkenal milik seseorang yang telah mendaftarkannya lebih dahulu pada Kantor Merek yang kemudian ditiru oleh orang lain baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya untuk barang-barang yang sejenis. Pada kasus demikian biasanya pihak pemilik yang sah atas merek tersebut pertama-tama akan mengirimkan "somasi" melalui surat kabar

dengan disertai klausul agar pihak penjiplakan dalam waktu tertentu mencabut barangnya yang memakai merek tersebut dari peredaran, atau perkaranya akan diselesaikan lewat pengadilan. Dalam hal ini ada kalanya pihak lawan yang menyadari itikad buruknya dan merasa tidak mampu melakukan pembuktian di depan sidang pengadilan, maka akan dengan sukarela menghentikan peredaran barang-barang yang memakai merek tersebut. Dengan demikian berarti dia telah dengan sukarela melepaskan haknya atas merek tersebut.

Selanjutnya tentang penghapusan kekuatan hukum suatu pendaftaran merek, yang artinya akibat hukum yang timbul karena adanya pendaftaran merek yang hapus. Sebagaimana telah disinggung dalam Undang-Undang Merek 2001, kekuatan hukum suatu pendaftaran merek hapus antara lain karena :

- a. Atas prakasa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.
- b. Penghapusan dari pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan jika cukup bukti bahwa merek bersangkutan, atau pertama-tama tidak dipakai berturut-turut selama 3 tahun atau lebih sejak didaftarkan, atau tidak dipakai untuk jenis barang atau jasa untuk nama merek ini didaftarkan. Sedangkan dalam pasal 2 ayat 2 kalimat kedua Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dinyatakan bahwa pendaftaran merek akan hapus karena selama 6 bulan sesudah pendaftaran belum dipergunakan oleh pihak pendaftar. Tidak dipakai selama 3 tahun ini dihitung sejak tanggal pendaftaran atau "pemakaian terakhir". Dalam memori penjelasan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan "penggunaan terakhir", (pemakai terakhir), adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang yang diperdagangkan saat tersebut dihitung dari tanggal produksi yang terakhir, sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

- c. Telah berakhirnya waktu 10 tahun sejak tanggal penerima permintaan pendaftaran merek menurut pasal 7 undang-undang merek 2001 dan ternyata tidak diulangi atau diperpanjang jangka waktu perlindungan hukumnya lagi sebelum waktu itu lampau.

Penghapusan pendaftaran merek ini dilakukan oleh Kantor Merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, dan dengan memberikan catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut serta diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Adanya penghapusan pendaftaran ini mengakibatkan bahwa berakhirilah kekuatan hukum dari pendaftaran merek bersangkutan.

Dapat juga diajukan gugatan untuk pembatalan dari pendaftaran merek karena dianggap melanggar pasal 5 yaitu persyaratan untuk dapat diterima pendaftaran sebagai merek dan pasal 6 jika terjadi persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis. Gugatannya diajukan terhadap pemilik merek dan juga Kantor Merek dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejak tanggal pembatalan atau tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan pembatalan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

B. Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sengketa atas merek

1. Masalah klaim suatu hak atas merek untuk barang sejenis dan barang tidak sejenis

Menurut sistem Undang-Undang Merek 2001 yaitu sistem konstitutif maka membawa akibat bahwa hakim tidak lagi memberikan perlindungan kepada pemakai

pertama, tetapi pada pendaftar pertama. Disini pendaftaran merek bukan pendaftar pertama. Pendaftaran merek bukan pendaftar mempunyai kedudukan "dianggap" sebagai pemakai pertama, tetapi pendaftar kalau pendaftarannya diterima, akan mempunyai hak mutlak atas merek terdaftar. Jadi pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek, bukan lagi pemakaian pertama.

Dengan dianutnya stelsel konstitutif ini memang lebih memberikan kepastian hukum, karena dalam hal ini para pendaftar yang telah mendaftarkan mereknya dan telah diterima pendaftarannya oleh Kantor Ditjen Hak Cipta Paten Merek, tidak akan takut lagi pendaftarannya akan dibatalkan karena gugatan orang lain yang mendalilkan sebagai pemakai pertama dari merek yang sama.

Hal ini selain untuk melindungi para produsen dari kerugian yang timbul akibat ulah orang-orang yang mendompleng ketenaran mereknya, juga terutama ditujukan kepada para konsumen atau khalayak umum. Bagi konsumen adanya peniruan atau penjiplakan dari merek-merek yang sudah terkenal akan sangat merugikan baginya. Karena biasanya barang-barang yang menggunakan merek tiruan ini memiliki mutu yang jelek daripada barang-barang aslinya.

Tetapi yang penting diperhatikan sebagai dasar utama daripada Undang-Undang Merek 2001 ini adalah keharusan untuk selalu beritikad baik. Prinsip itikad baik ini adalah suatu prinsip dasar sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Merek 2001 Merek hanya dapat didaftarkan atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Prinsip beritikad baik ini kita sudah saksikan berkenaan dengan perkara "Tancho" dimana dalam jurisprudensi Mahkamah Agung No. 677/K/Sip/1972 tanggal 13 Desember telah diletakkan dasar : yang berhak atas suatu merek bukan saja pemakaian pertama di Indonesia atau yang mendaftarkan sebagai pemakai pertama. Akan tetapi dalam hal ini dia harus selalu beritikad baik. Maka pengusaha Indonesia yang telah

mendaftarkan merek "Tancho" dalam Daftar Umum Merek di Indonesia ternyata kalah dan dibatalkan pendaftarannya karena ia dipandang tidak beritikad baik.

Secara umum sengketa merek dagang ini terjadi karena adanya dua merek atau lebih yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya. Sengketa merek ini dapat pula terjadi pada barang-barang yang tidak sejenis. Mengenai sengketa merek yang timbul karena adanya dua merek atau lebih yang mempunyai persamaan pada keseluruhan kiranya tidak perlu dipersoalkan secara panjang lebar. Karena sudah nyata terlihat bahwa antara kedua merek tersebut yaitu antara merek yang asli dengan yang tiruan terdapat persamaan secara menyeluruh. Namun untuk menentukan apakah diantara dua merek atau lebih tersebut terdaftar persamaan pada pokoknya. Agak sukar bagi kita untuk menentukannya. Sudargo gautama dalam hal ini mengatakan bahwa yang menentukan hal tersebut adalah kesan dari merek-merek bersangkutan kepada khalayak ramai.

Dan memang biasanya masyarakat dalam membeli barang tidak membandingkan dengan merek-merek yang ada, tetapi hanya mengingat-ingat terhadap kesan merek yang pernah dilihatnya, didengar dan yang tinggal dalam ingatannya. Sehingga apabila konsumen melihat dua merek pada suatu barang dan menurut kesannya adalah sama, maka dia akan menganggap bahwa kedua merek itu adalah sama atau berasal dari perusahaan yang sama.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk menentukan diantara dua merek yang lebih terdapat persamaan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Harus dipandang secara keseluruhannya antara kedua merek tersebut. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah, apakah lebih banyak titik-titik persamaan atau titik-titik perbedaannya.
- b. Harus diperhatikan sifat lahiriah dari kedua merek tersebut, yaitu kesan daripada merek itu jika dipandang oleh khalayak ramai.

c. Harus diperhatikan juga tentang warna-warna, bentuk, gambar atau lukisan dari kedua merek yang bersangkutan.

Kriteria lain mengenai persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek ini, baik yang dipakai oleh Kantor Ditjen Hak Cipta Paten dan Merek maupun Pengadilan Negeri pada umumnya juga mengikuti jurisprudensi yang ada. Yaitu keputusan dari hakim-hakim Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung terdahulu yang telah berkekuatan pasti. Misalnya merek "ACEA Brand" dan "A.C.E.A. Brand" keduanya untuk sikat gigi, dianggap mengandung persamaan pada pokoknya untuk jenis barang yang sama.

2. Penyelesaian terhadap sengketa hak atas merek

Bila ada beberapa pengusaha yang bergerak dalam bidang perusahaan yang sama, dalam daerah operasi yang sama pula, maka masing-masing dari mereka akan berusaha sekeras-kerasnya untuk melebihi yang lainnya dalam mendapat keuntungan. Dengan kata lain tiap-tiap pengusaha akan memperkembangkan perusahaannya dengan menjalankan ikhtiar untuk memperbesar pendapatannya. Hanya saja ikhtiar tersebut tidak boleh dijalankan sedemikian rupa sehingga pengusaha bertindak sewenang-wenang, yang artinya tidak mengindahkan akan kejujuran yang layak diharapkan dalam pergaulan hukum dengan pihak ketiga terutama dengan para konsumen.

Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mempergiat usaha menambah hasil produksi serta memperbesar keuntungan yang akhirnya tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha tetapi juga menguntungkan bagi konsumen, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tetapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang satu berusaha untuk menjatuhkan lawannya dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yaitu melanggar norma-norma sopan santun dalam lalu lintas perdagangan, maka persaingan itu telah menjadi persaingan curang atau persaingan melawan hukum.

Adanya persaingan curang atau persaingan melawan hukum dalam dunia perdagangan dan industri memang tidak boleh dibiarkan, karena persaingan curang ini selain sangat merugikan produsen yang beritikad baik, juga terutama sekali sangat merugikan para konsumen.

Begitu pula adanya persaingan curang yang dilakukan dengan cara-cara menjiplak atau meniru merek-merek yang sudah terkenal milik orang lain, harus pula mendapat penanganan yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini pemilik pertama merek yang merasa bahwa mereknya telah ditiru dan digunakan oleh orang lain secara sah, maka dia dapat memperjuangkan haknya tersebut baik secara perdata maupun pidana. Mengenai tuntutan secara perdata maupun pidana dapat saya uraikan sebagai berikut :

a. Gugatan Ganti Rugi berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Bagi pemilik merek terdaftar karena dia telah mendaftarkannya pada Kantor Merek yang kemudian merasa bahwa suatu pendaftaran merek yang telah dilakukan oleh orang lain ternyata terdapat persamaan baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek miliknya, maka dia dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek (pasal 68 UUM 2001). Atau pemilik merek yang terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap siapapun yang memakai mereknya, baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya, secara tanpa hak.

Tuntutan ini dapat merupakan permintaan ganti rugi dan disamping itu penghentian pemakaian merek bersangkutan dasar dari tuntutan ganti rugi ini, ialah karena pihak yang dianggap melanggar hukum atau "onrechtmatege daad", sesuai juga dengan ketentuan yang selalu dipakai sebagai dasar dalam menuntut ganti rugi menurut sistem Undang-Undang Merek 1961 No. 21 itu sendiri. Walaupun tidak diatur secara tegas, kemungkinan untuk minta ganti rugi menurut sistem undang-undang merek 1961 No. 21, adalah lazim

bahwa dapat diajukan gugatan untuk dilarang atau dihentikannya pemakaian merek oleh pihak yang digugat ini yang dianggap serupa dengan merek daripada sipemilik.

Selanjutnya gugatan ganti rugi ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau lain Pengadilan Negeri yang akan dibentuk. Dalam RUU dinyatakan bukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melainkan melalui Pengadilan Negeri dimana sesuai dengan ketentuan HIR (pasal 118), sitergugat bertempat tinggal. Hal ini sesuai dengan cara penentuan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum dibidang merek yang hingga kini berlaku, dalam rangka Undang-Undang Merek 1961 No. 21 yang didasarkan atas tututan pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak diajukan dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melainkan di Pengadilan Negeri dimana domisili tergugat berada.

Selanjutnya untuk memperjelas uraian diatas, berikut akan saya berikan contoh petikan dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus sengketa merek Levi's antara Levi's Strauss & Co melawan Ny. H. Zubaidah dalam hal ini tentang gugatan ganti rugi kerugian ex pasal 1365 KUH Perdata. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Perdata No. 166/Pdt/G/1984 Pn Jak. Sel.

Levi's Strauss & Co yang berkedudukan di Levi's Plaza 155 Battery Street, San Fransisco, California 94106 Amerika Serikat melalui kuasanya mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap Ny. Zubaidah, Jakarta Selatan, tentang gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Duduk perkara :

1. Bahwa tanpa sizin dan sepengetahuan penggugat, ternyata tergugat telah berani memproduksi dengan mencantumkan merek dagang milik penggugat.
2. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat telah benar-benar dirugikan dan karena itu penggugat mohon ganti rugi dari tergugat.

3. Bahwa sengketa ini telah diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dijatuhkan putusannya tanggal 26 Maret 1984, yaitu putusan No. 434/1984/Pdt/PN Jakrta Pusat.

Dalam petitum :

1. Bahwa perbuatan tergugat meniru merek Levi's penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
2. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi pada penggugat sebesar :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 30.000.000,-
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000,-

Keputusan Pengadilan

Pertimbangan hukumnya

1. Bahwa penggugat mengajukan gugatannya tersebut dengan mendalilkan bahwa penggugat adalah pemilik sah satu-satunya merek Levi's karena pendaftaran maupun karena pemakaian pertama di Indonesia.
2. Bahwa suatu putusan Pengadilan adalah merupakan bukti autentik yang kebenaran akan isinya wajib dipercaya, kecuali dapat dibuktikan oleh pihak lawan, sedangkan dalil pihak lawan tidak terbuti maka dengan demikian peniruan atau perbuatan melawan hukum telah terbukti.
3. Bahwa dengan demikian gugatan tentang adanya perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan.
4. Bahwa penggugat mengemukakan besarnya kerugian materiil tersebut sebesar tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000) akan tetapi penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti kwitansi-kwitansi atau tanda pembayaran dari periklanan secara terperinci di persidangan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengabulkan sebagian.
5. Bahwa demi untuk menghormati hak-hak seseorang atas suatu merek dan demi untuk memberikan pengertian kepada tergugat tidak semuanya mempergunakan merek pihak lain tanpa izin, maka Pengadilan akan menghukum

tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada tergugat sebesar Rp. 5.000.000,-

6. Bahwa mengenai kerugian immateriil ini penggugat juga tidak dapat memperlihatkan yang nyata berupa kwitansi-kwitansi tetapi menentukan besarnya kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hanya berdasarkan tafsiran saja.
7. Bahwa demi untuk menghormati hak orang lain atas suatu merek dan untuk memberikan pengertian kepada tergugat agar tidak semuanya mempergunakan merek pihak lain tanpa izin maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum untuk mebayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Isi Putusan

1. Menyatakan bahwa perbuatan peniruan yang dilakukan tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
2. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,-
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000,-

Analisa

Ditinjau dari bukti-bukti yang dikemukakan oleh penggugat, saya berpendapat bahwa pemakai pertama merek dagang Levis adalah penggugat apalagi juga sudah terdaftar. Hal ini juga telah terbukti dengan dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 434/1984/Pdt/Pn Jakarta Pusat, tanggal 26 Maret 1984 yang menghukum tergugat karena telah meniru merek Levi's milik penggugat.

Dengan demikian keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menetapkan bahwa perbuatan tergugat yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat telah terus menerus memproduksi barang dengan menggunakan atau mencantumkan merek yang sejenis dengan mereknya penggugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah sangat tepat.

Tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hanya mengabulkan sebagian gugatan tidak menunjukkan bukti-bukti kerugian secara pasti berapa besar kerugian sebenarnya. Tetapi disini penggugat hanya memperlihatkan kwitansi-kwitansi atau tanda pembayaran secara tidak terinci dimuka Pengadilan.

Selanjutnya dalam UUM 2001 dinyatakan bahwa pihak penggugat (pemilik merek) dapat minta pada hakim bahwa selama perkara diperkirakan dapat diperintahkan tergugat untuk menghentikan produksi daripada perdagangan barang jasa yang memakai merek secara tanpa hak. Hal ini yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata (pasal 180 HIR) dikenal dengan tuntutan provisi. Sekarang ini dalam Undang-Undang Merek hendaknya dipertegas kemungkinan tututan provisionil ini. Maka telah dituntut pula penyerahan barang atau nilai barang yang memakai merek bersangkutan, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang itu. Tetapi baru dapat dilaksanakan hal ini setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan tetap dan setelah penggugat membayar ganti rugi kepada tergugat.

b. Tuntutan pidana terhadap pelaku persaingan curang.

Disamping gugatan perdata yang diajukan oleh pihak yang mereka dirugikan tersendiri, pihak negara berdasarkan hak publiknya masih dapat menuntut secara pidana. Disamping tututan perdata oleh yang bersangkutan, maka tuntutan pidana dapat juga dilakukan oleh pihak penuntut umum, baik atas prakarsa sendiri maupun atas laporan daripada pihak yang dirugikan.

Tuntutan pidana terhadap pelaku persaingan curang, dalam hal ini peniruan/penjiplakan merek memang tidak diatur dalam Undang-Undang Merek 1961 No. 21. Di Indonesia terhadap orang yang melakukan persaingan curang diancam dengan hukuman pidana yaitu melalui pasal 382 bis dan pasal 393 KUH Pidana.

Dalam Pasal 382 bis KUH Pidana disebutkan bahwa barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkurensinya atau konkuren orang lain itu, karena persaingan curang. Dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau dengan paling banyak sembilan ratus juta rupiah.

Selanjutnya dikatakan oleh R. Soesilo bahwa agar ketentuan dalam pasal 382 bis KUH Pidana ini dapat dikenakan terhadap pelaku persaingan curang, maka harus dipenuhi unsur-unsur delik yang ada pada pasal tersebut, yaitu :

- a. Terdakwa harus melakukan perbuatan menipu.
- b. Perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik atau seseorang tertentu.
- c. Karena perbuatan itu mengakibatkan kerugian bagi saingannya.
- d. Saingan itu adalah saingan dari siterdakwa atau saingan dari orang lain yang dibela oleh terdakwa.

Di dalam praktek mengenai tuntutan pidana terhadap pelaku persaingan curang ini memang jarang digunakan. Hal ini terlalu lama dan rumit, karena disini terhadap orang yang mengajukan tuntutan pidana ex pasal 382 bis KUHP maupun pasal 393 KUHP diharuskan membuktikan kebenaran dari dalilnya bahwa kerugian yang dia alami tersebut benar-benar karena perbuatannya tergugat, bukan karena sebab yang lainnya. Biasanya pemilik merek lebih suka langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Merek 1961 No. 21 terhadap orang yang meniru/menjiplak mereknya.

Sedangkan dalam undang-undang merek 1992, masalah tuntutan pidana ini ternyata telah diatur dan sanksi pidananya jauh lebih berat daripada sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 382 bis

maupun pasal 393 KUH Pidana. Disini dapat kita melihat suatu perbedaan yang jelas dengan Undang-Undang 1961 No. 21 barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memakai merek yang sama baik pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain, untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi dan diperdagangkan, akan dipidanakan dengan penjara. Sanksi ini maksimal 7 tahun dan disamping itu denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dijelaskan pula, bahwa apa yang dimaksud dalam pasal 81 UUM 1992 ini adalah kejahatan.

Jika dalam pasal 81 ditentukan mengenai pemakaian merek yang seluruhnya sama, maka dalam UUM Tahun 2001 diancam juga dengan hukuman pemakaian merek yang merupakan peniruan untuk sebagian dan dinyatakan "mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan". Hukuman pidana yang diancam 5 tahun dan dendanya maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana ini dikenal sebagai persaingan curang, oneerlijke concurrentie atau unfair competition.

Kemudian diancam juga dengan sanksi pidana apa yang dinamakan sebagai tindakan pelanggaran barang siapa "dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memperdagangkan barang-barang yang diketahui atau patut diketahui merupakan hasil pemakaian merek secara tanpa hak". Maksimum pidananya 1 tahun dan denda 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jadi misalnya ada pemilik toko yang ikut memperdagangkan barang-barang dengan merek orang lain secara sengaja, akan turut dihukum juga dengan pidana penjara dan denda yang serupa seperti orang yang melakukan persaingan curang.

Melihat kenyataan diatas tampak sekali usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah yang ingin memberantas praktek-praktek pemalsuan merek di tanah air. Dengan ancaman pidana yang begitu berat diharapkan dapat menekan sekecil-

kecilnya minat para pengusaha yang ingin melakukan konkurensi curang dengan cara meniru atau memalsu merek. Tetapi meskipun UUM 2001 sudah mengatur sedemikian rupa, namun kasus pemalsuan merek masih saja sering terjadi, bahkan masyarakat sendiri sudah terbiasa menerima hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah.

Sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa di pasaran banyak dijumpai pemalsuan merek. Masyarakat sendiripun banyak yang mengetahui mana barang yang asli atau yang dipalsukan. Ironisnya justru yang palsu yang akan laku keras, karena memang harganya lebih murah dibandingkan dengan yang asli. Hal seperti inilah yang menjadi kendala dalam penuntutan pemalsuan merek.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem hukum yang dianut oleh undang-undang Merek 2001 dalam perolehan hak atas merek adalah sistem konstitutif yaitu hak atas merek diberikan berdasarkan pendaftaran pertama. Dalam sistem ini dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila merek tersebut dimintakan pendaftaran. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek, tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, juga tidak perlindungan. Tujuan dari penggunaan sistem ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, karena sekali merek itu didaftarkan dan memperoleh Sertifikat Merek, maka ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama.

Keuntungan dari sistem konstitutif ini adalah bahwa orang yang mereknya sudah terdaftar tidak dapat diganggu oleh pemakai merek yang tidak diketahui ketika ia mendaftarkan mereknya. Sedangkan kerugiannya adalah bahwa Daftar Umum Merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formil terdaftar, akan tetapi sepenuhnya tidak dipakai.

Saran

Kepada pemilik merek yang belum mendaftarkan mereknya agar segera mendaftarkan mereknya kepada Kantor Ditjen Hak Cipta Paten dan Merek. Karena Undang-Undang Merek yang baru menganut stelsel konstitutif, sehingga hanya merek yang mendaftarkan mereknya pertama kali pada Kantor Ditjen Hak Cipta Paten dan Merek yang akan dilindungi oleh hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 kepada pemerintah agar segera menempuh segala usaha untuk mensosialisasikan undang-undang ini kepada masyarakat, terutama para pengusaha kelas menengah kebawah yang biasanya sangat rendah tingkat pemahamannya terhadap peraturan dalam bidang merek. Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini, semoga skripsi ini dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran dalam mengatasi permasalahan hukum khususnya dalam bidang merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso, 1997. *Perselisihan Hak Atas Merek Di Indonesia*, Cetakan I, Liberti, Yogyakarta.
- Soekardono, R., 1983. *Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan IX, Dian Rakyat, Jakarta.
- Sudargo, Gautama, 1997. *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1994. *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Soesilo, R., 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeja, Bogor.
- Subekti, R., dan Tjipto Sudibio, R., 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan XIX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.